

**PENULISAN SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 42/PUU-XIX TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



**Diajukan oleh:**

**Margareta Tiara**

**NPM : 200513854**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENULISAN SKRIPSI**

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
42/PUU-XIX TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



**Diajukan oleh:**

**Margareta Tiara**

**NPM : 200513854**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2024**

# HALAMAN PESETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 42/PUU/XIX TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG MASA  
JABATAN DESA**



**Diajukan oleh:**

**Margareta Tiara**

**NPM : 200513854**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran pada tanggal :**

**27 Juni 2024**

**Dosen Pembimbing**



**Y. Hartono, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
42/PUU/XIX TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG MASA JABATAN DESA**



Diajukan oleh:

**Margareta Tiara**

**NPM : 200513854**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

Penulisan Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 27 Juni 2024**

**Tempat : Ruang pendadaran 3 Lantai 2**

Susunan Tim Penguji:

**Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.**

**Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 27 Mei 2024

Yang menyatakan,

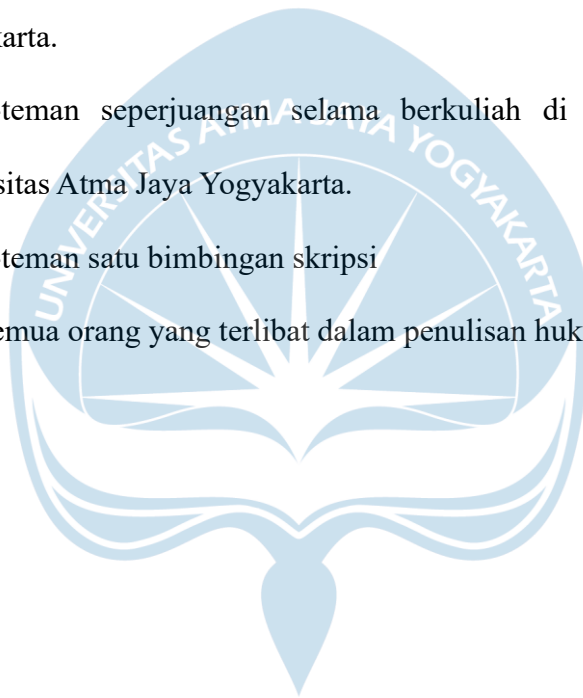
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margareta Tiara".

Margareta Tiara

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus selaku Bapa di Sorga yang selalu melindungi, menyertai dan melimpahkan karunia-Nya disepanjang hidup penulis.
2. Keluarga besar penulis yang sudah bekerja keras untuk penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Teman-teman seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Teman-teman satu bimbingan skripsi
5. Serta semua orang yang terlibat dalam penulisan hukum penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala pertolongan dan kasih karunia penulis dapat Penyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi Ini Yang Berjudul “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan pada program Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyelesaian tugas ini, penulis telah memberikan usaha yang terbaik. Selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan skripsi dan memberi masukan positif sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan tepat waktu

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar dan membimbing penulis pada awal penulis menimba ilmu hingga menyelesaikan skripsi.
5. Papa Lie Engke, Ahia Galing, Cece Ayang, Ahia Aju, serta anggota keluarga lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materi maupun kata-kata motivasi serta nasihat.
6. Para staff kampus yang selalu ramah menyapa dan membantu dalam hal administrasi atau kesusahan mengeluarkan kendaraan pada saat diparkiran
7. Metta, Yusi, Jeje, Dewi, Gaga, Lanang, Aca, Imel, Rachel, Evi, Anes selaku sahabat yang selalu memberikan semangat agar segera menyelesaikan skripsi dan menjadi sarjana hukum.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah terlibat dalam penulis menyelesaikan skripsi.



## ABSTRACT

*The village is not far removed from its relationship with the Village Head. However, the regulations regarding terms of office have been changed several times so that there is a misunderstanding between the prospective village head and the Village Law, resulting in the emergence of Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX of 2021 concerning Review of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. . This research method uses descriptive techniques by describing the problem regarding the impact that occurs regarding the periodization of the village head's term of office and the realization of democracy after the Constitutional Court Decision Number 42/XIX/2021 on Village Law No. 6 of 2014. Impact of the Constitutional Court Decision Number 42/2021 PUU-XIX/2021 regarding the realization of democracy in Indonesia is to limit the term of office of village heads to three terms, thereby reducing the potential for absolute power by ensuring that power is not in the hands of one person for too long. And extending the head's term of office has a positive impact, namely that the village head can optimally realize his Vision and Mission for the community. as well as negative impacts, namely the risk of abuse of position power. The impact of this decision on the realization of a democratic state is related to the legal strictness and constitutionality required in a democratic state. The results of the research are that this decision directly places restrictions on the position of village head which is expected to prevent abuse of authority and power by the village head.*

**Keywords:** *periodization of village heads, constitution, democracy, Constitutional Court Decision Number 42 of 2021*

## ABSTRAK

*Desa tidak jauh dari hubungannya dengan Kepala Desa. Namun aturan masa jabatannya beberapa kali mengalami perubahan sehingga terjadi kesalahpahaman antara calon kepala desa dengan Undang-undang Desa, sehingga berujung pada munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan memaparkan permasalahan mengenai dampak yang terjadi terhadap periodisasi masa jabatan kepala desa dan terwujudnya demokrasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/XIX/2021 tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dampak Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Terwujudnya Demokrasi di Indonesia adalah membatasi masa jabatan kepala desa menjadi tiga periode sehingga mengurangi potensi kekuasaan absolut dengan memastikan kekuasaan tidak berada di tangan satu orang terlalu lama. Dan perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan dampak positif yaitu kepala desa dapat mewujudkan Visi dan Misinya secara maksimal bagi masyarakat, serta dampak negatifnya yaitu risiko penyalahgunaan kekuasaan jabatan. Dampak dari keputusan tersebut terhadap terwujudnya negara demokrasi adalah terkait dengan ketegasan hukum dan konstitusionalitas yang diperlukan dalam negara demokrasi. Hasil penelitiannya adalah keputusan ini secara langsung memberikan pembatasan terhadap jabatan kepala desa yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa.*

**Kata Kunci :** *periodisasi kepala desa, konstitusi, demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PESETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	22
A. Kajian Teoritis Tentang Demokrasi.....	22
B. Konsepsi Negara Hukum Demokratis.....	24
C. Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa.....	27
D. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	30
E. Hasil Penelitian.....	31
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59